

Pimwan : Berpotensi Jadi Temuan BPK

SOLO—Pengadaan mobil sampah sebanyak 16 unit di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang dinilai menyalahi perencanaan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tri Rahayu
redaksi@solopos.co.id

- ▶ **Komisi II akan mengundang DPPKA untuk membahas kronologi pembelian mobil sampah.**
- ▶ **DPPKA diminta bertanggung jawab atas pembelian mobil sampah yang tidak sesuai rencana.**

Mengacu kepada rencana kegiatan anggaran (RKA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Solo tahun anggaran 2013, pengadaan mobil sampah senilai Rp9,8 miliar berupa mobil hidrolik. Sementara realisasinya justru mobil pikap.

Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, saat ditemui *Espos*, Kamis (13/2), mengungkapkan pengadaan mobil sampah yang

menyalahi RKA dan perencanaan tersebut berpotensi menjadi temuan BPK. Supriyanto menegaskan DPPKA harus mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut karena realisasi mobil sampah jelas tidak sesuai dengan RKA.

"Komisi II harus membuat surat kepada pimpinan dewan sehubungan dengan pengadaan mobil yang tidak sesuai rencana. Mestinya surat Komisi II itu didasarkan pada rapat kerja dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan [DKP] yang merupakan dinas teknis dan DPPKA sebagai pelaksana anggaran. Minimal kesalahan itu akan menjadi catatan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 yang akan dibahas pada Juli nanti. Waktu tidak bisa menjadi alasan," tegas dia.

Sementara untuk menindaklanjuti persoalan pengadaan mobil sampah yang tidak sesuai perencanaan, Komisi II DPRD Solo mengundang Kepala DKP Solo, Hasta Gunawan, Kamis siang. Dalam pertemuan itu, Hasta menerangkan pengadaan mobil sampah bukan di DKP melainkan di DPPKA. Dia menegaskan DKP hanya menerima barang kemudian ditambah keranjang besi. "Kalau keranjang besi itu anggarannya di DKP. Nah untuk pengadaan mobil sampah di tahun lalu dan di tahun ini ada di DPPKA. Mobil sampah di tahun ini memang jelas mobil hidrolik. Tapi, kalau pengadaan di 2013 hanya pikap biasa karena waktunya tidak memungkinkan," ujar dia.

Hasta menambahkan, anggaran Rp9,8 miliar digunakan untuk pengadaan alat berat bukan mobil sampah. "Mobil sampah yang diterima DKP didistribusikan ke 14 kelurahan dan sisanya dua unit untuk *back up* di DKP," tegas Hasta.

Teknologi Hidrolik

Hasta menambahkan dalam *grand design* pengelolaan sampah di Solo memang tidak menyebut teknologi hidrolik secara eksplisit. "Teknologi hidrolik itu merupakan inovasi dari pimpinan," tambah dia.

Dijumpai secara terpisah, anggota Komisi II DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, menyatakan mestinya anggaran pengadaan mobil sampah ada di DKP yang membidangi masalah sampah, bukan di DPPKA. Ketika anggaran di DPPKA, ujar Asih, spesifikasi barang menjadi tidak sesuai dengan perencanaan.

Pendapat Asih itu didukung Sekretaris Komisi II DPRD Solo, Hammi Mujadid Irsyad. Menurut Hammi, tidak mungkin DPPKA melakukan pembelian yang tidak sesuai bidangnya. "Kok bisa DPPKA membeli mobil sampah. Itu tidak nalar," tutur dia. Untuk memperjelas polemik pembelian mobil sampah, Ketua Komisi II DPRD Solo, Djaswadi, berencana mengundang DPPKA untuk hadir ke Komisi II dalam waktu dekat. Dia berharap DPPKA bisa menerangkan kronologi pengadaan mobil sampah yang jelas tidak sesuai dengan perencanaan.